ABSTRAK PERATURAN

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - IKATAN DINAS - PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN
2018

PERMENKEU RI NOMOR 184/PMK.01/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1829)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN DAN MEKANISME IKATAN DINAS BAGI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

ABSTRAK : - bahwa untuk mendorong kelancaran penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui lulusan Program Diploma I dan III Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan masa wajib kerja dan biaya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh mahasiswa dan lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil lulusan Program Diploma Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN yang tidak memenuhi ikatan dinas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037); Permenkeu RI No. 137/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1073); Permenkeu RI No. 2/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 No. 51) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 189/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 Tahun 1073); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 212/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 1981);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemenuhan kebutuhan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan negara, penentuan Ikatan Dinas bagi lulusan Prodi, CPNS PKN STAN, dan PNS PKN STAN, perhitungan besaran biaya pendidikan yang harus dibayar dan perhitungan besaran ganti rugi dalam hal tidak memenuhi ikatan dinas. Diatur pula ketentuan terkait kebutuhan pegawai, penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan program pendidikan, alokasi dan pengajuan formasi lulusan prodi, pengangkatan sebagai CPNS, penandatanganan perjanjian ikatan dinas, ikatan dinas dan ganti rugi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.01/2011; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran halaman 25-27.